

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka disini Penelitian terdahulu ini akan memaparkan tinjauan penelitian atas salah satu penelitian serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Sosialisasi Dalam Pelaksanaan Program Carik Jakarta Studi Kasus Dasawisma Pondok Kelapa. Pemaparan teori akan dimulai dari kaitan fokus penelitian dengan administrasi publik, dan akan diakhiri dengan kerangka pemikiran penulis yang dibangun dari teori yang akan dibahas selanjutnya.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam sub bab ini peneliti akan memaparkan tinjauan peneliti atas salah satu penelitian serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Perlu dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut ialah:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Nonny Lavka Vanya pada tahun (2022) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Sosialisasi Aplikasi Among Tani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kota Batu sebagai Smart City*”. Dalam skripsi yang dikaji berkaitan dengan Sosialisasi Aplikasi Among Tani untuk Mewujudkan Smart City. Dalam fokus penelitian dilakukan secara dalam dan jelas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan fakta dan data mengenai strategi Pemerintah Kota Batu dalam

pengelolaan data, dan meningkatkan kesadaran penggunaan aplikasi dalam bidang pertanian.<sup>1</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dedi Azwar pada tahun (2019) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Warung Sebagai Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Pada Kecamatan Tampan Pekanbaru)*”. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi penggunaan aplikasi e-Warung sebagai bantuan pangan non tunai pada masyarakat di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosialisai dengan menggunakan media sosialisasi langsung dan tidak langsung. Teknik pengumpulan data didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data menggunakan Triangulasi sumber.<sup>2</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Ramadhan dengan judul *Proses Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang* (2018). Tujuan penulis mengetahui bagaimana proses sosialisasi program JKK serta hambatan apa saja yang dialami dan bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Cileungsi. Metode yang

---

<sup>1</sup> Nonny Lavka Vanya pada tahun (2022) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Sosialisasi Aplikasi Among Tani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kota Batu sebagai Smart City*”. Diakses 4 April 2022 Pukul 15.00 WIB

<sup>2</sup> Dedi Azwar pada tahun (2019) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Warung Sebagai Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Pada Kecamatan Tampan Pekanbaru)*” “. Diakses 4 April 2022 Pukul 16.30 WIB

digunakan penulis adalah deskriptif yaitu metode yang diklasifikasikan dan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara. <sup>3</sup>



---

<sup>3</sup> Muhammad Rizki Ramadhan pada tahun (2018) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Proses Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang*”. Diakses 4 April 2022 Pukul 19.00 WIB

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti/Tahun Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Nonny Lavka Vanya (2022)	Sosialisasi Aplikasi Among Tani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kota Batu sebagai Smart City	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Sosialisasi.</li> <li>2. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang Aplikasi Among Tani.</li> <li>2. Objek Penelitian yang dilakukan di Kota Batu</li> </ol>
2.	Dedi Azwar (2019)	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Warung Sebagai Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Pada Kecamatan Tampan Pekanbaru)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Sosialisasi.</li> <li>2. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian yang dilakukan</li> <li>2. Perbedaan membahas tentang Aplikasi e-Warung</li> </ol>
3.	Muhammad Rizki Ramadhan (2018)	Proses Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang (2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian yang digunakan Metode Kualitatif</li> <li>2. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Sosialisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan.</li> </ol>

*Sumber : Peneliti 2022*

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Sosialisasi Kebijakan

#### 2.2.1.1 Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi Keluarga sebagai perantara sosialisasi primer. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

Sosialisasi primer adalah proses pertama dan utama yang dialami oleh individu. Sosialisasi ini akan mempengaruhi kehidupan individu di masa mendatang. Sosialisasi sekunder adalah lanjutan dari sosialisasi primer. Disini individu memulai proses identitas baru di lingkungan masyarakat. Anak-anak akan mengenal sekolah sebagai lembaga yang mempengaruhi proses sosialisasi.

James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh

pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Sedangkan Sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat berlangsung dalam dua bentuk, yaitu sosialisasi *represif* dan *partisipatif*. Sosialisasi *represif* ialah sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru.

Sedangkan sosialisasi *partisipatif* ialah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik.<sup>5</sup> Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi.

#### 1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal pada dasarnya merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu yang menyelesaikan proses sosialisasi tersebut. Faktor eksternal ini dapat berupa norma-norma, sistem sosial, sistem budaya, sistem mata pencarian yang ada di dalam masyarakat.

#### 2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri diri seseorang atau individu yang menyelesaikan proses sosialisasi.

---

<sup>4</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 65-66. Diakses 4 April 2022 Pukul 22.00 WIB

<sup>5</sup> *Ibid*

Wujud nyata dari faktor internal antara lain motivasi, minat, dan lainnya yang dapat berupa pembawaan ataupun warisan biologis termasuk kemampuan yang ada pada diri seseorang.

- Tujuan Sosialisasi

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada. Kemudian, Melalui kerja sama yang erat diharapkan masyarakat merasa memiliki sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja. Kemudian, Diharapkan masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih berarti. Namun pada umumnya suatu aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan apa yang akan di sampaikan Sosialisasi diharapkan dapat menyampaikan pesan pada masyarakat yang dituju atau ditargetkan itu. Kemudian, Dengan demikian perlu dipilih cara yang sesuai dengan masyarakat yang ditargetkan itu.

2. Untuk menarik perhatian

Aktivitas sosialisasi harus dilakukan dengan menarik agar masyarakat tertarik dan menyimpan pesan yang disampaikan dalam memori pikiran.

3. Tercapainya pemahaman

Sosialisasi yang direncanakan dengan baik dapat memudahkan masyarakat memahami pesan yang disampaikan kepadanya itu.

Kemudian, Pesan yang jelas dan penggunaan media yang tepat

dan menarik mampu menyampaikan pesan kepada pengguna dengan cepat dan tepat.

#### 4. Perubahan sikap

Ketika sosialisasi sudah dapat dipahami, organisasi mengharapkan suatu tanggapan dari calon terhadap sosialisasi tersebut itu.

#### 5. Tindakan

Tujuan akhir sosialisasi adalah mempertahankan keberadaan organisasi melalui peningkatan hasil yang dicapai akibat meningkatkan pengguna yang memanfaatkan barang, jasa, ataupun program yang ditawarkan.

#### 2.2.1.2 Kebijakan

Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya. Beberapa pandangan dari berbagai pihak mengenai kebijakan, yaitu kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaksana atau sekelompok pelaksana lainnya guna memecahkan suatu masalah yang menjadi perhatian banyak pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> William N. Dunn, 2004 dalam Arwildayanto, Arifin, Warni, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (hal 4) Diakses 5 April 2022 Pukul 03.15 WIB

Kebijakan sebagai proses pengambilan keputusan, kebijakan (policy) merupakan pernyataan atau pemahaman umum berisikan pedoman, pemikiran dalam proses pengambilan keputusan yang mengikat dan memiliki esensi pada batasan tertentu dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat keputusan yang berhubungan dengan biaya, personil, jadwal untuk mencapai tujuan (goals,) yang dilakukan oleh sejumlah aktor terdiri pimpinan, bawahan, lembaga pemerintah atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu.<sup>8</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi, sifatnya mengikat, mengatur peril saya orang guna mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi. Kebijakan juga jadi referensi para anggota organisasi atau institusi dalam berperilaku saya. Kebijakan bersifat problem solving dan proaktif, beda dengan peraturan dan hukum juga kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretatif, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Kebijakan mestinya bersifat umum saja tanpa

---

<sup>7</sup> Koontz dan Donnell 1987 (hal 3) Diakses 5 April 2022 Pukul 03.40 WIB

<sup>8</sup> Wahab,1997 (hal 4) Diakses 5 April 2022 Pukul 04.15 WIB

menghilangkan ciri local spesifik. Maka dari itu kebijakan bisa memberi peluang dimaknai sesuai kondisi yang ada.

### 2.2.1.3 Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan dilakukan, sebagai proses pengenalan nilai yang terkandung didalam kebijakan, prosedur, ataupun adanya kesamaan dalam pemahaman yang mana hal itu penting untuk dilakukan sehingga membentuk suatu kesatuan penafsiran antar individu didalam organisasi tersebut. Sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan yang telah di buat akan bermanfaat bila di sosialisasikan. Sosialisasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

“Sosialisasi Kebijakan merupakan proses dimana manusia belajar melalui cara, nilai dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya lainya melihat bagaimana manusia meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma dan budaya sebuah masyarakat tersebut yang berlaku di sekelilingnya melalui merasi, dan percaya diri sendiri dan proses sosialisasi dibudayakan sepanjang hayat”,<sup>9</sup> indikator pada sosialisasi ini didasarkan pada. Tahapan proses sosialisasi yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, yaitu

---

<sup>9</sup> George herbert Mead 1962 (hal 121) Diakses 5 April 2022 Pukul 10.00 WIB

### 1. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan digulirkan, seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan.

### 2. Tahap Meniru (*Play Stage*)

Pada tahap meniru ini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

### 3. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Pada tahap ini masing-masing orang mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya.

### 4. Tahap Penerimaan (*Acceptance Stage*)

Pada tahap ini masyarakat dapat menilai apakah hasil dari penerapan kebijakan atau produk kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat atau Carik Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) dapat menilai pula apakah implementasi kebijakan ini dapat bermanfaat untuk mereka sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

#### 2.2.1.4 Peran Pelaksanaan Sosialisasi dalam Kebijakan Publik

Jika sosialisasi dikaitkan dengan kajian terhadap proses kebijakan publik maka sosialisasi merupakan proses yang dilakukan sebelum kebijakan memasuki tahap implementasi dan setelah suatu kebijakan dibuat. "Sosialisasi bukan merupakan rangkaian dari

proses kebijakan publik yang mana proses kebijakan publik".<sup>10</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa secara mendasar dan tidak langsung sosialisasi tidak memiliki keterkaitan terhadap tiga tahapan kebijakan formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). Akan tetapi demi terlaksananya implementasi kebijakan, sosialisasi ini memiliki kedudukan yang strategis sebagaimana tujuan yang sudah dibuat dalam proses formulasi kebijakan, yaitu karena beberapa alasan antara lain:

Pertama, berbagai pihak yang terlibat termasuk kelompok sasaran didalamnya perlu mengetahui isi atau substansi dari kebijakan, dalam hal ini untuk menyebarluaskan isi atau substansi kebijakan kepada pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat (didalamnya kelompok sasaran) maka diperlukan adanya peran sosialisasi.

---

<sup>10</sup> Dian Herdiana, Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar (hal 17) Diakses 5 April 2022 Pukul 12.15 WIB

Kedua, diperlukannya pengetahuan serta pemahaman atas maksud dan tujuan dari sebuah kebijakan oleh setiap pihak yang terlibat dan diatur oleh kebijakan tersebut, hal tersebut menjadikan sosialisasi sebagai kegiatan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta pedoman atas peran masing-masing dari berbagai pihak yang terlibat atau yang diatur oleh kebijakan tersebut.

Ketiga, perlu diketahuinya kesiapan respons dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sebelum kebijakan itu dilaksanakan dan masuk pada proses implementasi kebijakan. Kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait serta memberikan perkiraan tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami dalam proses kebijakan publik sosialisasi bukan merupakan bagian didalamnya, akan tetapi sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah dibuat bisa diterima dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan termasuk pihak-pihak atau kelompok sasaran dan kebijakan.

### **2.2.3 Pelaksanaan**

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan, Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Menurut Hasibuan pelaksanaan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau berkerja sama dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Menurut Hasibuan pelaksanaan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau berkerja sama dan berkerja efektif untuk mencapai tujuan.<sup>12</sup>

### **1. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan (*actuating*)**

#### **a. Fungsi Pelaksanaan**

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya manusia dan non-manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia

---

<sup>11</sup> S Suradi, 2018 Website <http://repository.radenfatah.ac.id/>

<sup>12</sup> *Ibid*

yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi dari pelaksanaan (*actuating*) menurut *James Stoner* dalam *Al Istiqomah* adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

b. Tujuan pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain yaitu:

1. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
2. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Menyimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satu yang harus dilakukan pemimpin terhadap bawahannya dengan memberikan motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.

## 2. Prinsip Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antar manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Dalam manajemen, pelaksanaan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia, juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda, memiliki pandangan serta pola hidup yang berbeda pula. Oleh karena itu, pelaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu:

### a. Prinsip mengarah pada tujuan

Pokok dari pengarah nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarah, akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Pengarah tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi ini perlu mendapatkan dukungan/bantuan dari faktor-faktor lain seperti: perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan

yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan.

b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan

Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Mereka mengkehendaki demikian dengan harapan tidak terjadi penyimpangan yang terlalu besar dan kebutuhan mereka dapat dijadikan sebagai pelengkap serta harmonis dengan kepentingan perusahaan. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar. Sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik, dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Prinsip kesatuan komando Prinsip

kesatuan komando ini sangat penting untuk menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Bilamana para bawahan hanya memiliki satu jalur di dalam melaporkan segala kegiatannya. Dan hanya ditujukan kepada satu pimpinan saja, maka pertentangan di dalam pemberian instruksi dapat dikurangi, serta semakin besar tanggung jawab mereka untuk memperoleh hasil maksimal.

Menurut Kurniawan dalam Al Istiqomah, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan (*actuating*) antara lain:

- a. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
  - b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia.
  - c. Menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi.
  - d. Menghargai hasil yang baik dan sempurna.
  - e. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
  - f. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
  - g. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.
3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan ada 2 yaitu:

1) Faktor Pendukung

- a. Kepemimpinan (*leadership*)
- b. Sikap dan Moral (*Attitude and Morale*)
- c. Tata hubungan (*Communication*)
- d. Perangsang (*Incentive*)
- e. Supervisi (*Supervision*)
- f. Disiplin (*Discipline*)

2) Faktor Penghambat

Kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya, hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakekat perilaku dan hubungan antar manusia. Seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow, di negara berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan

fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan sedangkan di negara maju kebutuhan yang menonjol adalah aktualisasi diri dan harga diri (*self esteem*). Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi etos kerja dan produktifitas kerja.<sup>13</sup>

#### 2.2.4 Program Carik Jakarta

Kata “Carik” diambil dari istilah Jawa yang artinya ‘juru tulis’. Hal ini mencerminkan tugas kader PKK atau dasawisma sebagai pendata yang menjadi ujung tombak kolaborasi pengumpulan data terpusat ini. Sejak Desember 2019, para dasawisma ini sudah bergerak untuk melakukan pendataan dengan mengumpulkan KTP, KK, hingga melaporkan kondisi keluarga secara komprehensif.<sup>14</sup>

Peluncuran aplikasi “Carik Jakarta” dilakukan pada saat acara Temu Kader pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian Carik Jakarta akan mengintegrasikan semua program Pemprov DKI yang menjangkau keluarga dan masyarakat melalui jalur ibu-ibu PKK. Dalam hal ini kader Dasawisma memastikan kebutuhan keluarga dan masyarakat terpenuhi dengan baik dari aspek yang paling dasar seperti kesehatan sampai kebutuhan lainnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu untuk mencangkup

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Carik Jakarta . pada <https://jakarta.go.id/> .Diakses 14 Maret 2022 . Pukul 04.30 WIB

<sup>15</sup> Ayu Wulandari pada tahun (2021) dalam bentuk skripsi dengan judul “*Evaluasi Program Pendataan Carik Jakarta Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi di Dasawisma Petungkang Utara*”. Hal 3 Diakses 1 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB

pendataan warga DKI Jakarta menggunakan aplikasi mobile Carik Jakarta. Yang dilakukan oleh kader dasawisma se- DKI Jakarta. Proses pendataan dilakukan secara *door-to-door* selama periode November 2019 – Maret 2020. Pendataan Carik Jakarta mencakup tiga aspek yaitu : <sup>16</sup>

1. Pendataan Bangunan,
2. Pendataan Individu, dan
3. Pendataan Keluarga

Berdasarkan data tersebut terdapat 1.832.134 jumlah bangunan di DKI Jakarta. 2.271.148 jumlah keluarga di DKI Jakarta. Kemudian 7.401.520 jumlah individu di DKI Jakarta.

Kader Dasawisma tersebar di seluruh wilayah di DKI Jakarta dan keikutsertaan kader Dasawisma ini bersifat sukarela. Pada tahun 2021, terdapat 76.114 kader Dasawisma yang ditetapkan oleh SK Lurah. Data dalam aplikasi Carik Jakarta meliputi kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, rawan banjir dan kebakaran.

a. Kependudukan

Bagian ini menjelaskan data terkait administrasi dan data kasar kependudukan yang terdata melalui Aplikasi Carik Jakarta periode November 2019- Maret 2020. Data terkait kependudukan yang akan ditampilkan akan mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah

---

<sup>16</sup> Website Carik Jakarta, pada <https://carik.jakarta.go.id/> . Diakses 1 Maret 2022 Pukul 20.00 WIB

balita, jumlah lansia, kepemilikan akta nikah dan kepemilikan akta lahir.

b. Keluarga Berencana

Bagian ini menjelaskan data data terkait program Keluarga Berencana yang terdata melalui Aplikasi Carik Jakarta. Data yang ditampilkan di bagian ini mencakup jumlah WUS (Wanita Usia Subur), PUS (Pasangan Usia Subur) dan kepesertaan KB.

c. Pembangunan Keluarga

Bagian ini menjelaskan data data terkait indeks pembangunan keluarga yang terdata melalui Aplikasi Carik Jakarta. Data terkait Indeks Pembangunan Keluarga yang ditampilkan pada bagian ini mencakup jumlah ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan partisipasi warga dalam berbagai kelompok dengan kegiatan (poktan) BKKBN.

d. Kesehatan

Bagian ini menjelaskan data terkait kesehatan penduduk terutama mengenai riwayat pemeriksaan kesehatan riwayat penyakit serta penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Data terkait penyakit yang ditampilkan di bagian ini yaitu pemeriksaan IVA pada penduduk perempuan, anemia, kanker (payudara, rahim, serviks), leukemia, penyakit kronis (darah tinggi, jantung, diabetes mellitus, stroke), HIV, tuberkulosis, DBD dan cacangan pada balita.

e. Pendidikan

Pada bagian ini menjelaskan data terkait aspek pendidikan yang terdata melalui Aplikasi Carik Jakarta. Data yang ditampilkan pada bagian ini terutama jumlah anak usia sekolah.

f. Sosial

Bagian ini menjelaskan data yang terkait aspek sosial ekonomi masyarakat. Data yang ditampilkan pada bagian ini yaitu status kemiskinan.

g. Perumahan

Pada bagian ini menjelaskan data terkait rumah sehat dan layak huni yang terdata melalui Aplikasi Carik Jakarta. Komponen pertanyaan perumahan mencakup kondisi atap, dinding, lantai, sumber penerangan, sumber air minum, sumber air bersih, bahan bakar memasak, kepemilikan dan jenis jamban, pembuangan akhir tinja, pembuangan limbah, sampah rumah tangga, pencahayaan, ventilasi dan kondisi jalan.

h. Rawan Banjir dan Kebakaran

Bagian ini menjelaskan data terkait potensi bangunan/rumah rawan kebakaran dan banjir di perumahan di DKI Jakarta yang terdata melalui Aplikasi Carik Jakarta.

### 2.2.3 Konsep Dasawisma

Menurut Binti Azizaton, kata Dasawisma berasal dari kata “dasa” yang artinya sepuluh dan “wisma” yang artinya rumah.<sup>17</sup> Sehingga Dasawisma memiliki arti sepuluh rumah. Dasawisma merupakan kegiatan yang dibentuk oleh PKK (Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang sukses diterapkan sejak era Suharto. Sekelompok ibu yang berasal dari sepuluh rumah bertetangga yang disebut Dasawisma.

Kegiatannya mengarah pada peningkatan kesehatan keluarga. Kemudian PKK merupakan organisasi yang memiliki tingkatan dan hubungan dengan lembaga pemerintahan desa hingga pemerintah pusat. Sedangkan Dasawisma menjadi objek pelaksanaan program nasional pada tingkat terkecil yaitu RT (Rukun Tetangga).

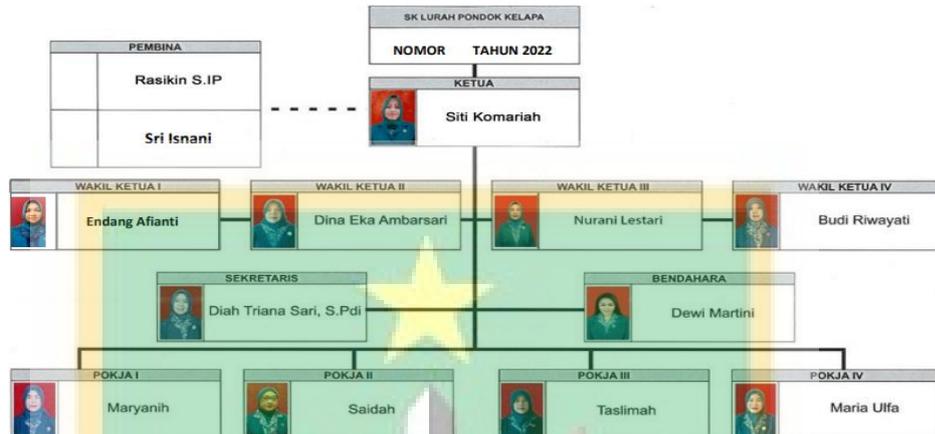


---

<sup>17</sup> Binti Azizaton Nafi'ah pada tahun (2020) dalam bentuk jurnal dengan judul *E-Data Dasawisma : Penguatan Peran Perempuan Sebagai Agen Data Sipil Pemerintah Era Pasca Pandemi Covid-19*

**Gambar 2.1**

Struktur Tim Penggerak PKK  
Kelurahan Pondok Kelapa - Kecamatan Duren Sawit  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Tahun 2022



Sumber : TP-PKK Pondok Kelapa

Berikut Visi dan Misi PKK yang dapat menjadi rujukan bagi kelompok Dasawisma (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Prov. DKI Jakarta, 2017):

a. Visi

Terciptanya ekosistem keluarga bahagia demi terwujudnya Jakarta yang maju, lestari dan berbudaya.

b. Misi

1. Menjadi penggerak yang mengutamakan pelibatan masyarakat dan pembelajar yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman,
2. Menjadi sumber rujukan data dalam penelitian, pengembangan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan,

3. Menumbuhkan karakter keluarga yang bahagia, aman, dan damai melalui: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta semangat gotong royong,
4. Menumbuhkan lingkungan keluarga yang cerdas, kreatif, sejahtera, dan mandiri melalui upaya pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan kehidupan berkoperasi,
5. Menciptakan ketahanan keluarga melalui peningkatan keterampilan dalam pengelolaan sandang, pangan, dan rumah tangga yang sehat dan layak,
6. Menciptakan keluarga sehat melalui pembiasaan pola hidup bersih dan sehat, peningkatan kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat,
7. Memaksimalkan RPTRA sebagai laboratorium PKK yang merupakan pusat pembelajaran dalam pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kewirausahaan Terpadu.

Dalam membangun kota, Pemprov DKI Jakarta cukup terbantu dengan kehadiran kader dasawisma yang tersebar di setiap Kota dan Kabupaten Administrasi. Melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta yang bermitra dengan TP PKK Provinsi DKI Jakarta, kader dasawisma diedukasi dengan berbagai kegiatan orientasi secara berjenjang.

Kader dasawisma merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan, menggerakkan, dan menyampaikan informasi mengenai program PKK dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kota. Keberadaan kader dasawisma sudah disebutkan pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2017.

Pada tahun 2021, ada 76.114 kader Dasawisma yang ditetapkan oleh SK Lurah. Bagian ini menjelaskan jumlah kader Dasawisma se-provinsi dan distribusi kader per kota administrasi di DKI Jakarta. Secara hirarki, keberadaan kader dasawisma berada di tingkat RT, di mana koordinasi langsung yang dilakukan oleh kader dasawisma adalah kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RT di lokasi kader tersebut ditugaskan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kader dasawisma juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan kader lain di lingkungannya, seperti kader PPKB (Pembantu Pembina Keluarga Berencana), Jumantik, Posyandu, Ketua RT, Kelompok PKK RT, dan Pengelola RPTRA.

Para kader dasawisma telah dibekali berbagai informasi baik itu secara langsung maupun daring terkait program-program Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya, program-program dapat tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Lalu, pendataan keluarga satu pintu melalui aplikasi Carik

Jakarta diharapkan juga dapat berjalan optimal dengan adanya peran kader dasawisma.<sup>18</sup>

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam fasilitasi pemberdayaan perempuan dan keluarga pra-sejahtera berfungsi antara lain:

1. Mempercepat perubahan (*Enabler*) yaitu membantu kaum perempuan untuk mengidentifikasi masalahnya dan mengembangkan kapasitas diri agar dapat menangani masalah yang dihadapi.
2. Perantara (*Mediator*), yaitu melakukan mediasi individu/kelompok dalam keluarga yang membutuhkan bantuan pelayanan apabila terjadi konflik.
3. Pendidik (*Educator*), yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif, membangkitkan kesabaran individu/kelompok kaum perempuan dalam kehidupan keluarga.
4. Perencana (*Planner*), yaitu mengumpulkan data mengenai permasalahan dalam kehidupan keluarga, kemudian dianalisa dan memberikan alternatif tindakan yang rasional.
5. Advokasi (*Advocation*), yaitu memberikan advokasi atau mewakili kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan untuk mau mendengar,

---

<sup>18</sup> Dasawisma . pada <https://nasional.tempo.co> . Diakses 14 Maret 2022 . Pukul 18.00 WIB

mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan kaum perempuan dalam kehidupan keluarga.<sup>19</sup>

Selain tugas yang sudah disebutkan sebelumnya, Dasawisma juga memiliki tugas tambahan lain yaitu tugas update pendataan Dasawisma.

Tugas update pendataan Dasawisma antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan Resiko Tinggi Covid-19  
Melakukan pendataan kepada lansia atau non lansia yang rentan, sangat rentan atau tidak ada faktor resiko tambahan,
2. Pendataan Resiko Covid-19 pada Ibu Hamil dan Menyusui Melakukan pendataan kepada ibu hamil dan menyusui,
3. Pendataan Anak yang Orang Tuanya Terpapar atau Terdampak Covid-19 Melakukan pendataan terhadap anak yang orang tuanya terpapar atau terdampak Covid- 19,
4. Upload Foto Bangunan  
Melakukan upload tampak luar foto bangunan dan tampak dalam bangunan (masing-masing satu foto),
5. Lapori Keluarga Isolasi Mandiri  
Melakukan pendataan keluarga yang terkonfirmasi positif, pandemic dan menunggu hasil tes.

---

<sup>19</sup> Ketahanan Keluarga . <https://dp3akb.jabarprov.go.id> Diakses 14 Maret 2022 . Pukul 20.00 WIB

#### 2.2.4 Kelurahan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan.<sup>20</sup> Kelurahan terdiri atas dusun-dusun atau lingkungan lingkungan Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Lurah.

Kelurahan terdiri atas dusun-dusun atau lingkungan lingkungan Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Lurah.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam Bab III Pasal 5 bahwa Lurah mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

---

<sup>20</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Gambar 2.2



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2022

Tabel 2.2

Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Kelapa

No	Nama	Jabatan
1	RASIKIN, S.IP., M.Si	Lurah
2	SELFY HIDAYATI, S.PD	Sekretaris Kelurahan
3	ARIFIN	Satgas Pol PP Kelurahan
4	DEDDY ERNAWAN	Satlak PTSP Kelurahan
5	ADITYA YODI S.	Satpel Dukcapil
6	dr. SUSI SALWATI	Puskesmas Kelurahan
7	RATNA DEWI SURYATI SIAGIAN, A.M.d.Keb,SE	Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

8	JAIMIN, S.AP	Kepala Seksi Pemerintah, Ketentraman, dan Ketertiban
9	SRI ISNAINI	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Data Kelurahan 2022



#### **2.2.4.1 Dasar Hukum Kelurahan Pondok Kelapa**

1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

#### **2.2.4.2 Letak Geografis Kelurahan Pondok Kelapa**

Sesuai adanya pola pengembangan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana wilayah Kelurahan Pondok Kelapa termasuk wilayah pemukiman. Sehingga dengan lajunya penambahan dari bulan ke bulan terdapat kenaikan jumlah penduduk di Kelurahan Pondok Kelapa yang tercatat sebanyak 71.070 jiwa dari 21.933 kepala keluarga (KK), dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kelurahan Pondok Kopi
2. Sebelah Timur: Kelurahan Bintara
3. Sebelah Selatan: Kelurahan Jatibening
4. Sebelah Barat : Kelurahan Duren Sawit

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya hal ini, maka timbulnya ketidak seimbangan suatu wilayah dalam menampung jumlah penduduk yang menyebabkan kualitas hidup manusia semakin meningkat sehingga menimbulkan adanya permasalahan pendataan warga di Provinsi DKI Jakarta. Maka timbulnya peningkatan jumlah masyarakat di DKI Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Dalam menyikapi kekurangan pada proses pendataan, maka pada tahun 2019 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peluncuran sebuah aplikasi baru yang diberi nama Carik Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu untuk mencakup pendataan warga DKI Jakarta menggunakan aplikasi mobile Carik Jakarta.

**Tabel 2.3**

**Kerangka Berfikir**



*Sumber : Peneliti 2022*